

OPINI PUBLIK TERHADAP SOSIALISASI KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR SAMARINDA

RATIH PURWANENGI¹

Abstrak

Artikel ini berisi tentang opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda. Untuk mengetahuinya peneliti menggunakan kuisisioner dan kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada responden terpilih dengan menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data serta kepustakaan untuk membantu pengumpulan data-data yang diperlukan. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, yang berasal dari RT 28, RT 29, RT 32, RT 33, dan RT 36. Responden ditentukan dengan cara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, termasuk dalam kategori rendah atau tidak benar karena sosialisasi yang dilaksanakan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Opini Publik, Sosialisasi, e-KTP

Pendahuluan

Indonesia tercatat sebagai urutan ke-empat negara dengan jumlah penduduk terbanyak, selain itu Indonesia juga menjadi negara ke-lima pada daftar negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu sekitar 3,5 juta jiwa setiap tahunnya. Hal ini lah yang menjadi faktor utama pentingnya suatu sistem pendataan penduduk yang terpadu demi menunjang kelancaraan kehidupan masyarakat Indonesia yang menyangkut status

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pnratih@gmail.com

kependudukan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu unsur penting dalam administrasi kependudukan adalah Dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan salah satu dokumen kependudukan yang sangat vital bagi masyarakat adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pelaksanaan administrasi kependudukan di Indonesia telah berjalan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa permasalahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan mengenai administrasi kependudukan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya penduduk yang memiliki identitas ganda, yaitu penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat buruk bagi Negara Indonesia, karena dengan identitas ganda dapat memungkinkan seseorang untuk menghindari pajak, mempermudah korupsi, kecurangan dalam Pemilihan Umum, bahkan dapat menyembunyikan identitas seseorang, misalnya bagi para teroris.

Fakta diatas dapat terjadi dikarenakan sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Untuk itu perlu diadakan pembenahan dalam sistem administrasi kependudukan yang ada di Indonesia yaitu dengan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, berupa sistem informasi terintegrasi secara nasional yang memungkinkan untuk melakukan pengolahan data kependudukan secara cepat dan akurat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) telah meluncurkan program database kependudukan berbasis elektronik melalui e-KTP. KTP elektronik (e-KTP) merupakan metode baru yang diterapkan pemerintah untuk membangun sebuah sistem kependudukan tunggal, terintegrasi, dan satu atap milik pemerintah. KTP elektronik (e-KTP) ini merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Administrasi Kependudukan dengan berbasis data tunggal, dan serangkaian peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006, PERPRES No. 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, PERPRES No.26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, PERPRES No. 35 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PERPRES No. 26 Tahun 2009 dan penerapan KTP elektronik serta peraturan terkait lainnya.

Penerapan KTP Elektronik harus lah mendapat dukungan dari semua pihak agar tidak timbul kendala – kendala yang mampu menghambat proses penerapannya. Mundurnya target penerapan KTP Elektronik (e-KTP) menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang masih kurang maksimal, salah satunya adalah sosialisasi mengenai e-KTP tersebut oleh pihak yang bertanggung jawab menyebarkan informasi terkait.

Kerangka Dan Teori Konsep

Teori S-O-R

S-O-R merupakan singkatan dari *Stimulus – Organism – Response*. Teori S-O-R berasal dari psikologi, teori ini menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.

Prinsip stimulus-respon pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimuli tertentu (Sasa, 2005 : 5.14). Prof. Dr. Mar’at dalam bukunya “Sikap Manusia, perubahan serta Pengukurannya”, mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting, yaitu Perhatian, Pengertian, dan Penerimaan.

Komunikasi

Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata latin “*Communicatio*”, istilah yang bersumber dari perkataan “*Communis*” yang berarti sama. Sama disini yang maksudnya sama makna atau sama arti. (Effendy, 2003 : 30).

Dari berbagai pengertian komunikasi yang ada dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna dimana secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan menciptakan suatu saling pengertian (kesamaan arti) di antara keduanya.

Fungsi Komunikasi

Menurut Effendi (2003:8) fungsi komunikasi adalah:

- a. Menyampaikan informasikan (*to inform*)
- b. Mendidik (*to educate*)
- c. Menghibur (*to entertain*)
- d. Memengaruhi (*to influence*)

Unsur-unsur Komunikasi

Unsur – unsur komunikasi menurut Philip Kotler berikut ini :

1. *Sender* : Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang
2. *Encoding* : Penyandian, yakni proses pengalihan pikiran dalam bentuk lambang
3. *Message* : Pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator
4. *Media* : Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan
5. *Decoding* : Pengawasandian, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambing yang disampaikan oleh komunikator kepadanya
6. *Receiver* : Komunikan yang menerima pesan dari komunikator
7. *Response* : Tanggapan, Seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan
8. *Feedback* : Umpan balik, yakni tanggapan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator
9. *Noise* : Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.

Pengertian Opini Publik

Opini publik berasal dari bahasa Inggris ‘public opinion’ yang berarti pendapat umum atau opini publik. Hingga saat ini telah banyak definisi opini publik yang dikemukakan berbagai ahli, seperti yang dikemukakan James Bryces dalam “*Modern Democracy*” Opini Publik merupakan kumpulan pendapat dari sejumlah orang tentang masalah-masalah yang dapat mempengaruhi atau menarik minat perhatian masyarakat di dalam suatu daerah tertentu.

Proses Pembentukan Opini Publik

Menurut Santoso Sastropoetra (1990) yang mengutip George Carslake Thompson, kalau publik menghadapi isu maka timbul perbedaan opini karena :

1. Perbedaan pandangan terhadap fakta
2. Perbedaan perkiraan tentang cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan
3. Perbedaan motif

Karakteristik Opini Publik

Opini publik sebagai fenomena sosial memiliki beberapa karakteristik tertentu. Salah satunya adalah Floyd Allport (1954:55-56) yang merangkum pokok-pokok karakteristik opini publik menjadi 12 karakteristik, yaitu : (1) Opini publik merupakan perilaku manusia individu-individu, (2) dinyatakan secara verbal, (3) melibatkan banyak individu, (4) situasi dan objeknya dikenal secara luas, (5) penting untuk orang banyak, (6) pendukungnya berbuat atau bersedia untuknya, (7) disadari, (8) diekspresikan, (9) pendukungnya tidak mesti berada ditempat yang sama, (10) bersifat menentang atau mendukung sesuatu, (11) mengandung unsur-unsur pertentangan, (12) dan efektif untuk mencapai objektivitas.

Peran Media Massa dalam membentuk Opini Publik

Berkembangnya opini publik tidak lepas dari peranan komunikasi massa. Masalah sekecil apapun suatu pemberitaan bisa menjadi perkembangannya cepat karena media. Dalam media sendiri mereka berebutan untuk mengekspos “objek yang dijadikan isu”, sehingga persepsi jamak menjadi khalayak memiliki pandangan jamak pula. Bernard Hennessy beranggapan bahwa media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam dialog politik dan dalam pemecahan konflik sosial secara politik karena menurutnya media massa mampu mempengaruhi keputusan politik dengan memberikan atau tidak memberikan publikasi kepada para calon dan penyelenggara kebijakan.

Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Pengertian KTP Elektronik (e-KTP)

KTP Elektronik atau e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian, baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai dengan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP)

Pada pasal 17 poin d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan dengan jelas bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan yang meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pada Peraturan yang sama, pasal 21, disebutkan lebih rinci bahwa dalam pelaksanaan kewenangan diatas, Bupati/Walikota mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional untuk opini publik merupakan sekumpulan pendapat dari individu ataupun sejumlah masyarakat terhadap suatu permasalahan atau isu yang dapat mempengaruhi atau menarik minat perhatian publik. Adapun permasalahan atau isu yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah mengenai sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) oleh Pemerintah berupa komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik oleh Pemerintah secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

Metode penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada (Bungin, 2001:187). Sesuai dengan permasalahan dan objek yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara kuantitatif bagaimana opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai yaitu :

- a. *Observasi*

Observasi melalui pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertian ini berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian yang meliputi opini publik dalam menanggapi sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda.

c. Kuesioner (Angket)

Angket dalam penelitian ini diberikan kepada responden untuk memperoleh data tentang pandangan, pendapat, sikap dan penilaian publik mengenai sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda.

Kuisisioner ini diberikan pada responden terpilih yang menjadi obyek dalam penelitian kemudian responden menjawab pertanyaan yang ada dalam kuisisioner tersebut

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang menjadi opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) , antara lain:

1. Sosialisasi oleh Pemerintah secara langsung :
 - a. Pemberian informasi melalui undangan
 - b. Edukasi melalui pertemuan – pertemuan
2. Sosialisasi melalui kerjasama dengan pihak lain
 - a. Organisasi Kemasyarakatan
 - b. Perguruan Tinggi
3. Sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat melalui media
 - a. Surat Kabar
 - b. Radio
 - c. Spanduk / Baliho
 - d. Televisi
 - e. Internet

Populasi dan Sampel

Untuk menentukan besaran sampel dari populasi digunakan rumus Yamane seperti yang dikutip Rakhmat (2002:82) dengan tingkat presisi 10 %, dengan rumus :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Ket : n = Jumlah sampel

 N = Jumlah populasi

 d = Presisi (10%)

Dari hasil perhitungan dihasilkan jumlah besaran sampel yang akan diteliti adalah sebesar 99,141 yang dibulatkan menjadi 99 orang.

Penelitian ini akan difokuskan pada 5 RT yang paling mendekati kriteria sampel yang dimaksudkan, yaitu sebagian besar warganya telah melakukan proses rekam data e-KTP, yaitu RT 28, RT 29, RT 32, RT 33, dan RT 36

Untuk menjaga agar sampel benar – benar mewakili kelima RT tersebut penulis akan menggunakan perhitungan sampel secara proporsional dengan menggunakan rumus yang dikutip dari Endang S. Sari (1993:52) sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{N} .(n)$$

Ket:

n_i = jumlah sampel pada masing-masing strata

N_i = jumlah populasi pada masing-masing strata

N = jumlah populasi secara keseluruhan

n = jumlah sampel

Berdasarkan perhitungan *proportional sampling* pada lima RT Kelurahan Sidomulyo yang dijadikan lokasi penelitian, maka diperoleh pengalokasian sampel sebagai berikut :

NO	RT	JUMLAH MASYARAKAT (N_i)	JUMLAH SAMPEL BERDASARKAN <i>PROPORTIONAL SAMPLING</i>	PEMBULATAN SAMPEL (n_i)
1	28	127	15,56	16
2	29	132	16,17	16
3	32	141	17,27	17
4	33	243	29,77	30
5	36	165	20,21	20
JUMLAH		808	98,98	99

Untuk selanjutnya, pengambilan sampel di masing – masing RT akan menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu penarikan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, penarikan sampel seperti ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono,2011: 85).

Adapun cara penentuan siapa saja yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan undian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner/angket, kemudian menganalisis hasilnya dengan bantuan alat ukur statistik yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Sollutions*). Skala yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :

- Skala Likert*, yaitu metode skala yang mengukur baik tanggapan positif maupun negatif suatu pertanyaan.
- Analisis *mean* bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh dari masing-masing faktor yang tercantum dalam koesioner. Hasil analisis *mean* merupakan nilai rata-rata dari pendapat responden yang dihitung dengan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum fi}{n}$$

Ket :

\bar{x} = rata-rata pendapat responden

Σfi = jumlah pendapat responden

n = banyaknya responden

- c. Selain itu juga dilakukan Pengumpulan data lewat wawancara. Namun pengumpulan data dengan cara ini hanya dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Pengukuran Data

Opini publik tentang sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda diukur dari hasil penghitungan skor dari tiap pertanyaan sesuai dengan prosedur pengukuran data skala likert (Kriyantono : 135-136). Nilai untuk masing-masing kategori jawaban adalah sebagai berikut :

Sangat Benar (SB) : skor 5

Benar (B) : skor 4

Kurang Benar (KB) : skor 3

Tidak Benar (TB) : skor 2

Sangat Tidak Benar (STB) : skor 1

Kemudian untuk menentukan kriteria skor jawaban responden terlebih dahulu ditentukan skala interval dengan menggunakan rumus sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2001) sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Ket:

I = Interval

R = Nilai skor tertinggi – Nilai skor terendah

K = Jumlah kelas

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Geografis Kelurahan Sidomulyo

Desa / Kelurahan : Sidomulyo
Nomor Kode : 175001.1003
Kecamatan : Samarinda Ilir
Kabupaten / Kotamadya: Samarinda
Provinsi DATI I: Kalimantan Timur

Kelurahan Sidomulyo secara administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, dengan luas kelurahan kurang lebih 194 Ha, dan terdiri dari 41 Rukun Tetangga (RT).

2. Keadaan Penduduk

Sebagian besar penduduk Kelurahan Sidomulyo adalah campuran etnis berbagai daerah dan kebanyakan adalah pendatang. Jumlah keseluruhan penduduk dari Kelurahan Sidomulyo berdasarkan data monografi kelurahan pada tahun 2012 yaitu 15.637 jiwa yang terdiri dari 4746 KK.

Bidang Sarana dan Prasarana

Adapun untuk bidang sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Sidomulyo adalah sarana keagamaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana olah raga.

Hasil Penelitian

Opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa penjelasan dibawah ini yang berdasarkan perhitungan analisis mean:

1. Opini publik mengenai sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo termasuk dalam kategori rendah sebesar 203 karena publik menganggap masih banyak masyarakat Kelurahan Sidomulyo yang belum mengetahui hal-hal penting mengenai e-KTP, seperti apa itu e-KTP, fungsi e-KTP serta tujuan diterapkannya e-KTP di Indonesia.
2. Opini publik terhadap sosialisasi e-KTP oleh Pemerintah secara langsung masuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 201 untuk sosialisasi melalui undangan, dan 200 untuk sosialisasi melalui pertemuan. Hal ini dikarenakan informasi mengenai e-KTP dalam undangan yang disebarakan tidak cukup memberikan penjelasan mendasar tentang e-KTP. Disamping itu, informasi melalui pertemuan juga tidak tersebar dengan merata karena hanya diperuntukan bagi kepala Rukun Tetangga (RT) saja.
3. Opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak lain masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar 136 untuk sosialisasi melalui organisasi

kemasyarakatan, dan 125 untuk sosialisasi melalui perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan publik menganggap kedua pihak tersebut tidak turut mensosialisasikan KTP Elektronik (e-KTP) kepada masyarakat.

4. Opini publik terhadap sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) dengan iklan layanan masyarakat melalui media masuk dalam berbagai kategori, terkait dengan media yang digunakan. Adapun rincian kategori masing-masing media adalah :
 - a. Surat Kabar masuk dalam kategori rendah, yaitu sebesar 198
 - b. Radio masuk dalam kategori sangat rendah, yaitu sebesar 174
 - c. Spanduk dan baliho masuk dalam kategori rendah, yaitu sebesar 191
 - d. Televisi masuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 293
 - e. Internet masuk dalam kategori sangat rendah, yaitu sebesar 177.

Perbedaan kategori ini disebabkan oleh intensitas penggunaan media tersebut oleh masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu perbedaan banyaknya informasi mengenai KTP Elektronik (e-KTP) yang tersedia di masing-masing media juga menyebabkan perbedaan kategori tersebut.

5. Opini publik tentang pengaruh sosialisasi terhadap keberhasilan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) masuk dalam kategori tinggi sebesar 372 karena publik menilai bila sosialisasi e-KTP terlaksana dengan baik maka masyarakat akan mengerti pentingnya e-KTP sehingga menimbulkan kesadaran untuk turut mensukseskan penerapan e-KTP tersebut. Demikian juga sebaliknya.
6. Opini publik terhadap opini publik yang memiliki hubungan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah masuk dalam kategori tinggi sebesar 373 karena publik menyatakan bahwa opini merupakan kekuatan keempat demokrasi dalam pemerintahan, selain itu juga dikarenakan keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari opini yang berkembang dimasyarakat.
7. Publik menganggap bahwa sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo tidak benar dalam pelaksanaannya, karena dilihat dari total skor secara keseluruhan yaitu hanya sebesar 2643 dengan rata-rata sebesar 202,25 dan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan dilapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan Dan Saran

Sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP) di Kelurahan Sidomulyo masih belum benar, kesimpulan ini berdasarkan perhitungan opini publik dari responden dimana hasil penelitian menunjukkan Opini tersebut masuk dalam kategori rendah atau tidak benar. Hal ini disebabkan sosialisasi yang dilaksanakan dilapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam proses pelaksanaan sosialisasi, yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara maksimal

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tertulis, juga diharapkan agar dapat lebih memaksimalkan peran pihak-pihak lain yang sekiranya dapat membantu dalam menyukkseskan sosialisasi ini, yaitu organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada dilingkungan sekitar warga, serta lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti perguruan tinggi, serta dapat lebih memperhatikan opini publik yang ada untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping itu masyarakat selaku sasaran sosialisasi hendaknya bisa lebih aktif dalam mencari informasi seputar KTP Elektronik. Solusi yang mungkin dapat dilaksanakan adalah dengan mengakses informasi-informasi yang tersedia pada media-media yang ada.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2008. *Opini Publik*. Penerbit Pustaka Indonesia.
- Arifin, Anwar, 2010, *Opini Publik*. Jakarta : Gramata Publising.
- Bernard Berelson : *Communication and Public Opinion* dalam “Reader” op cit hal. 451.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Effendi, Uchjana Onong, 2003. “*Ilmu, teori dan Filsafat Komunikasi*”. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Mulyana, Dedi. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2006. *KOMUNIKASI POLITIK Khalayak dan Efek*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurudin. 2007. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. Jakarta : PT INDEKS.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.

Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Scott M. Cutlip & Allen H. Center, *Effective Publik Relations*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., Second Edition, Hal 59

Dokumen – dokumen :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang *Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*

Prosedur Standar Operasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Secara Massal Tahun 2011, *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta 2011*

Sumber internet :

<http://markbiz.wordpress.com>.

<http://exploredia.com/most-populated-countries-in-the-world-2011/>

<http://e-ktp.com/>